

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI



**Oleh :
Feryandi
130710114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh :
Feryandi
130710114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Feryandi
NPM 130710114

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Oleh
Feryandi
130710114**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 07 Februari 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Pemberlakuan sanksi tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemui secara khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajakan pajak tahunan tidak dilakukan. Sanksi tilang yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda bahkan sanksi penjara. Ranah polisi lalu lintas terkait hal tersebut tidaklah lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan untuk mengetahui hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pemberian sanksi oleh polisi lalu lintas terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sangatlah tidak dibenarkan oleh hukum sehingga tidak dapat diterapkan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat berjalanya sanksi tilang tersebut, antara lain : faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

Kata Kunci : Tilang Pajak Kendaraan, Sanksi.

ABSTRACT

The application of ticket sanctions to traffic violations is indeed necessary to maintain security conduciveness in traffic. The application of ticket sanctions carried out by traffic police to vehicles that do not pay annual taxes on motorized vehicles has hurt the form of community life. In Law Number 22 Year 2009 no specific sanctions are given if the annual tax display is not carried out. The ticket penalties given by Traffic Police have burdened the community because besides these sanctions it is not relevant in the case of motorized vehicles that do not pay annual taxes. In Law No. 28 of 2009 in the case of disobedience to payment of taxes subject to fines, even imprisonment The domain of traffic police related to this is no longer in accordance with their duties and responsibilities. As for the formulation of the problem in this study is how the implementation of ticketing sanctions on vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and the obstacles posed to the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The purpose of this research is to find out the application of ticketing sanctions to vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and to find out the obstacles posed by the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The type of research in this paper is normative legal research or library legal research methods, namely the method or method used in legal research conducted by examining existing library materials. Giving sanctions by traffic police to vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles is not justified by law so that it cannot be applied. There are several factors that result in not being able to cross the ticket penalty, including legal factors, law enforcement factors, community factors.

Keyword : Vehicle Tax Ticket, Sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto.,S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
7. *Mama* Hendra Sinulingga yang selalu mengingatkan penulis untuk segera mendapatkan gelar S1.
8. Agustina Sinulingga selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada Penulis
9. *Bolang* Terang Kata Tarigan yang selalu mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada penulis.
10. Anggra Satria Sitindaon, S.H. yang telah memberikan semangat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai tanpa mengenal waktu.
11. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Lussy Rosima, Agustinus Ginting, Ario Anggara, Iwan. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini

Batam, 06 Februari 2019

Feryandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi, Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Lalu Lintas	12
2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.2. Kerangka Yuridis	28
2.2.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	28
2.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Metode Pengumpulan Data	35
3.2.1. Jenis Data	36
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	37
3.3. Metode Analisis Data.....	38
3.4. Penelitian Terdahulu	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Kedudukan Hukum Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.....	43
4.1.2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tumpang Tindih Kewenangan Pemberian Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	45
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Kedudukan Hukum Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.....	46
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tumpang Tindih Kewenangan Pemberian Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	57
BAB V PENUTUP	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	63